



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 89/M.PPN/HK/06/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.57/M.PPN/HK/06/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PENGEMBANGAN STATISTIK HAYATI

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat administrasi kependudukan dan mengembangkan statistik hayati telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.57/M.PPN/HK/06/2021;
  - b. bahwa dalam lampiran Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat penggantian dan penambahan unit kerja di Kementerian/Lembaga pada setiap Kelompok Kerja Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Kelompok Kerja Strategi Nasional Percepatan

Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
  4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati;
  5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
  6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
  7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.57/M.PPN/HK/06/2021 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PENGEMBANGAN STATISTIK HAYATI.

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pokja Stranas AKPSH akan dibantu oleh Sekretariat Tim Nasional Stranas AKPSH secara *ex officio* melalui unit kerja dalam lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selama pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pokja Stranas AKPSH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 89/M.PPN/HK/06/2022  
TANGGAL 29 JUNI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KELOMPOK KERJA STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN UNTUK PENGEMBANGAN STATISTIK HAYATI

A. PENGARAH

- Ketua Tim Pengarah : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Wakil Ketua Tim Pengarah : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

B. TIM PELAKSANA

- Ketua Tim Pelaksana : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua Tim Pelaksana : Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.

Pokja 1: Perluasan Jangkauan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

- Ketua : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
- Wakil Ketua : Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri.
- Anggota : 1. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.  
2. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.

3. Direktur ...

3. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas.
5. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
6. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
7. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
8. Direktur Pendaftaran Penduduk, Kementerian Dalam Negeri.
9. Direktur Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
10. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri.
11. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri.
12. Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.
13. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Kesehatan.
14. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan.
15. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
16. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
17. Direktur Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama.
18. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung.
19. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Mahkamah Agung.
20. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan.

21. Asisten Deputi Sistem Informasi Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
22. Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
23. Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
24. Kepala Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
25. Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial.
26. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial.
27. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
28. Direktur Penegakan Hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
29. Kepala Biro Pengendalian Operasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
30. Direktur Layanan dan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
31. Direktur Layanan Informatika Aplikasi Pemerintahan, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
32. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
33. Kepala Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

34. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
35. Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
36. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
37. Kepala Pusat Data Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
38. Kepala Pusat Data dan Informasi, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
39. Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan.

Pokja 2: Peningkatan Kesadaran dan Keaktifan Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam Mencatatkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting

- Ketua : Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri.
- Wakil Ketua : Direktur Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
- Anggota : 1. Direktur Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas.  
2. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.  
3. Direktur Pendaftaran Penduduk, Kementerian Dalam Negeri.  
4. Direktur Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.  
5. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri.  
6. Direktur ...

6. Direktur Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama.
7. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Kesehatan.
8. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
9. Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
10. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri.
11. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung.
12. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Mahkamah Agung.
13. Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
14. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial.
15. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
16. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
17. Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
18. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
19. Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
20. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



21. Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pokja 3: Percepatan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus

Ketua : Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial.

Wakil Ketua : Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

- Anggota :
1. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas.
  2. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
  3. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
  4. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
  5. Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas.
  6. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.
  7. Direktur Pendaftaran Penduduk, Kementerian Dalam Negeri.
  8. Direktur Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
  9. Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
  10. Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.
  11. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan.
  12. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri.

13. Direktur ...

13. Direktur Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama.
14. Direktur Urusan Agama Kristen, Kementerian Agama.
15. Direktur Urusan Agama Katolik, Kementerian Agama.
16. Direktur Urusan Agama Hindu, Kementerian Agama.
17. Direktur Urusan Agama Budha, Kementerian Agama.
18. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung.
19. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Mahkamah Agung.
20. Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial.
21. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.
22. Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial.
23. Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Kementerian Sosial.
24. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial.
25. Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial.
26. Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Kementerian Sosial.
27. Direktur Pemberdayaan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
28. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
29. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
30. Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan.

31. Direktur ...

31. Kepala Pusat Data dan Informasi, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
32. Direktur Bina Penataan Bangunan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
33. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pokja 4: Pengembangan dan Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Statistik Hayati yang Akurat, Lengkap, dan Tepat Waktu untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

- Ketua : Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik.
- Wakil Ketua : Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri.
- Anggota :
1. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
  2. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
  3. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas.
  4. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri.
  5. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan.
  6. Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Keuangan.
  7. Direktur Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan.
  8. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik.
  9. Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik.
  10. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

11. Direktur Pemberdayaan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
12. Direktur Layanan Informatika Aplikasi Pemerintahan, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
13. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
14. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Kesehatan.
15. Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
16. Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
17. Kepala Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

Pokja 5: Penguatan Koordinasi, Kolaborasi, dan Sinkronisasi Antar-Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan dalam Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pengembangan Statistik Hayati

Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Wakil Ketua : Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial.

Anggota : 1. Asisten Deputi Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.  
2. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.  
3. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas.  
4. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas.

5. Direktur ...

5. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.
6. Direktur Pendaftaran Penduduk, Kementerian Dalam Negeri.
7. Direktur Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
8. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri.
9. Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.
10. Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
11. Kepala Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
12. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan.
13. Direktur Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama.
14. Direktur Urusan Agama Kristen, Kementerian Agama.
15. Direktur Urusan Agama Katolik, Kementerian Agama.
16. Direktur Urusan Agama Hindu, Kementerian Agama.
17. Direktur Urusan Agama Budha, Kementerian Agama.
18. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung.
19. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Mahkamah Agung.
20. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

21. Direktur ...

21. Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
22. Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
23. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
24. Direktur Tata Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
25. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri.
26. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati